MUKADIMAH
Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial
Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP - Universitas Islam Sumatera Utara, Medan
e-Journal: http://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mkd | e-mail: mukadimah@fkip.uisu.ac.id
ISSN: 2622-1373 (Online)
ISSN: 2614-1159 (Print)
Volume 5 | Issue 1
February 2021

MENETAPKAN LANGKAH DALAM KEMELUT: REVOLUSI DI KERAJAAN PADANG

Yushar Tanjung

Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Abstract

This paper aims to examine the events of the social revolution and its consequences in the kingdom of Padang, Tebing Tinggi after independence during the Tengku Hasyim era. This study is analyzed using library research methods and field research with a historical approach through heuristic techniques. From the results of the study, information was obtained that the last King of the Kingdom of Padang was Tengku Hasyim, who was one of the prominent freedom fighters who stated that the Padang Kingdom was within the territory of the Republic of Indonesia. During the time of Tengku Hasyim, two important events occurred, namely Indonesian independence. Then the Social Revolution at Tebing Tinggi. Tengku Hasyim's political stance was to fully support the independence of the Republic of Indonesia and surrender the Kingdom of Padang to become part of the Republic of Indonesia. However, this did not make him immediately free from the anger of the masses who were against traditional power. In 1946, the "Social Revolution" occurred in the Kingdom of Padang which resulted in the elimination of the power of this kingdom and other Malay kingdoms in East Sumatra in a bloody event. He survived with the help of the royal family from Tanjung Kasau and when the Kingdom of Padang was under the government of the Republic of Indonesia, Tengku Hasyim held the position of Ambtenaar Bestuur Aangelegenhedeen (ABA) or mayor in 1947-1950.

Keywords: Kingdom of Padang; Tebing Tinggi; Tengku Hasyim; history; revolution.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menelisik peristiwa revolusi sosial serta akibat yang ditimbulkannya di Kerajaan Padang, Tebing Tinggi pasca kemerdekaan pada masa Tengku Hasyim. Kajian ini diurai dengan menggunakan metode *library research* dan *field research* dengan pendekatan historik melalui teknik heuristik. Dari hasil kajian diperoleh informasi bahwa Raja Kerajaan Padang terakhir adalah Tengku Hasyim yang merupakan salah satu tokoh pejuang kemerdekaan menyatakan bahwa Kerajaan Padang berada dalam wilayah Republik Indonesia. Pada masa Tengku Hasyim ada dua peristiwa penting terjadi, yakni kemerdekaan Indonesia. Kemudian peristiwa Revolusi Sosial di Tebing Tinggi. Sikap politik Tengku Hasyim adalah mendukung sepenuhnya kemerdekaan Republik Indonesia dan menyerahkan Kerajaan Padang menjadi bagian dari Republik Indonesia. Walau demikian, ini tidak membuatnya serta merta lepas dari amukan massa yang anti kekuasaan tradisional. Pada tahun 1946, terjadilah peristiwa "Revolusi Sosial" di Kerajaan Padang yang mengakibatkan terhapusnya kekuasaan kerajaan ini beserta kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Timur lainnya dalam suatu peristiwa berdarah. Ia selamat dengan bantuan keluarga kerajaan dari Tanjung Kasau dan ketika Kerajaan Padang sudah berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia, Tengku Hasyim menduduki jabatan sebagai *Ambtenaar Bestuur Aangelegenhedeen* (ABA) atau walikota pada tahun 1947-1950.

Kata Kunci: Kerajaan Padang; Tebing Tinggi; Tengku Hasyim; sejarah; revolusi.

PENDAHULUAN

Pada abad ke-17 di kota Tebing Tinggi sekarang pernah terdapat sebuah kerajaan yang tumbuh, berkembang dan mencapai kejayaannya pada masa Tengku Hasyim. Kerajaan ini dikenal sebagai Kerajaan Padang yang berpusat di tepi Sungai Padang atau tepatnya di Kampung Bajenis atau Borjonis atau Bah Jornih. Pusat pemerintahannya berada di Bajornis di tepi sungai dan dataran yang luas, sejauh mata memandang terhampar padang-padang yang merupakan ladang tempat menanam berbagai jenis buah-buahan sehingga kampungnya disebut Bajenis (Khalik, 2014, p. 63).

ARTICLE HISTORY: Submitted: 2021-02-29 | Revised: 2021-03-24 | Accepted: 2021-04-05 | Published: 2021-04-10
HOW TO CITE (APA 6th Edition):
Tanjung, Yushar. (2021). Menetapkan Langkah dalam Kemelut: Revolusi di Kerajaan Padang. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*. *5*(1), 171-179.
CORRESPONDANCE AUTHOR: yushartanjung@gmail.com | DOI: 10.30743/mukadimah.v5i1.3734
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License (http://creativecommons.org/license/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Kerajaan Padang merupakan salah satu kerajaan Melayu di Pantai Timur Sumatera. Kerajaan ini dirikan oleh salah seorang keturunan bangsawan Kerajaan Raya dari Simalungun bernama Tuanku Umar Baginda Saleh Komar bergelar Tuan Hapulakan Saragih Dasalak.

Tuanku Umar Baginda Saleh Komar hidup semasa dengan Gocah Pahlawan tahun 1612, seorang panglima Aceh termasyhur yang pernah menyerang kerajaan Deli untuk memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh. Raja-raja yang memerintah Kerajaan Padang setelah pemerintahan Raja Umar Baginda Saleh sebanyak 11 orang. Masa kejayaannya di bawah pimpinan raja ke-7, yakni Raja Tebing Pangeran dengan pusat pemerintahannya di Bandar Khalifah. Kegiatan perdagangan berlangsung dengan intensitas yang tinggi berbarengan dengan kegiatan kerajaan Melayu lainnya di Pantai Timur Sumatera sampai pusat kekuasaan dipindahkan ke Tebing Tinggi. Pada masa inilah Kerajaan Padang menjadi incaran pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Sebagai wilayah penghubung antara daerah pesisir dan pedalaman, Kerajaan Padang memiliki peran penting secara ekonomis dan politis. Kerajaan Padang ikut pula berperan saat memihak kepada Republik Indonesia untuk memerdekakan diri dari Belanda. Peran Kerajaan Padang semakin krusial pada masa Tengku Hasyim, raja ke-12. Kala itu perjuangan kemerdekaan Indonesia mencapai puncaknya setelah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan di *Esplanade* (kini Lapangan Merdeka) *Gemeente* (Kotapraja) Tebing Tinggi pada bulan Oktober 1945. Tengku Hasyim menghadiri Upacara Proklamasi itu sebagai bentuk dukungan kepada kemerdekaan Indonesia dengan menyatakan bergabungnya Kerajaan Padang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tahun 1946, setahun setelah pernyataan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, timbul ketegangan di wilayah Sumatera Timur dalam pemerintahan kerajaan-kerajaan Melayu dalam menentukan sikap atas kemerdekaan Indonesia. Pergolakan dan pertentangan pendapat antara para pemuda pejuang dengan para raja kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur menimbulkan sikap saling curiga. Ketegangan ini meruncing karena sikap kaum revolusioner dari kalangan pemuda memandang keberadaan para bangsawan adalah kelompok yang tidak mendukung kemerdekaan dan dikategorikan sebagai kaum feodal yang menghisap rakyat. Apalagi ada kecurigaan bahwa kerajaan ini akan mengambil langkah berseberangan dengan perjuangan yang sudah dibangun dan diwujudkan dengan kemerdekaan.

Oleh karena itu pasca kemerdekaan, sikap yang akan diambil oleh Kerajaan Padang menjadi "duri dalam daging", walaupun Tengku Hasyim sebagai pewaris telah menyatakan sikap yang jelas, namun sentimen yang dibenturkan dengan pandangan sosialis yang dianut oleh para pemuda revolusioner tidak dapat terbendung dan berakhir pada gerakan revolusi untuk melucuti status unsur-unsur kerajaan sampai ke akar-akarnya. Melucuti kekuasaan para raja/sultan di Sumatera Timur merupakan peristiwa hitam dalam Sejarah Indonesia pasca Kemerdekaan yang dikenal sebagai peristiwa Revolusi Sosial. Revolusi Sosial juga menghantam Kerajaan Langkat, Asahan, Panai, dan Kotapinang dalam bentuk tragedi penghancuran secara fisik dan psikis sehingga menghapus kenangan tentang kerajaan ini yang pernah mewarnai aktivitas masyarakat khususnya bangsa Melayu di Sumatera Timur.

Kerajaan Deli, Serdang, Bedagai, Kualuh juga tidak lepas dari tragedi ini yang mengakibatkan salah satu kelas sosial masyarakat Melayu yakni bangsawan tergerus dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu. Kelas bangsawan bukan hanya menunjukkan kelompok elite dalam masyarakat Melayu, sejatinya adalah salah satu identitas kemelayuan dalam sistem sosial masyarakatnya yang terstruktur secara hierarki. Kelompok sosial ini terpinggirkan bahkan mengalami penistaan serta pembantaian dari kelompok anti bangsawan melebihi batas perikemanusiaan. Secara sosial-budaya pada masyarakat Melayu dengan dalih tidak berpandangan positif atas kemerdekaan yang baru diproklamirkan. Revolusi sosial merupakan penistaan budaya bagi masyarakat Melayu.

Pandangan kaum revolusioner yang diusung para pemuda mencapai puncaknya. Sebagian dari kaum revolusioner ini secara tidak terkontrol membentuk kelompok ekstremis yang melakukan tindakan "main hakim sendiri" dengan cara mengobrak-abrik tatanan sosial yang menjadi ciri dan kebanggaan masyarakat Melayu sampai ke akar-akarnya atas nama perjuangan kemerdekaan. Ini terjadi dalam skala luas dalam peristiwa yang dikenal sebagai Revolusi Sosial Sumatera Timur tanggal 3 Maret 1946. Peristiwa ini juga melanda Kerajaan Padang yang dipimpin oleh Tengku Hasyim yang sebenarnya telah mendukung kemerdekaan Indonesia. Tengku Hasyim mengeluarkan pernyataan yang jelas bahwa Kerajaan Padang adalah bagian dari Republik Indonesia. Akan tetapi sikap ini tidak dinilai sebagai bentuk dukungan bagi Republik dan tertutupi sentimen negatif sehingga perbuatan untuk melenyapkan kelas sosial tertentu dari masyarakat Melayu ini terus bergelora.

Keluarga Kerajaan Padang tetap jadi incaran kelompok ekstremis yang mengaku mendukung kemerdekaan dan membersihkan republik dari elite sosial lama yang mempunyai status sosial sebagai penguasa. Demikian juga dengan Tengku Hasyim sebagai Raja Kerajaan Padang juga tidak luput dari amukan kelompok ekstremis ini dengan mengikutsertakan rakyat melalui slogan anti kaum feodal. Pada saat revolusi sosial ini terjadi, Tengku Hasyim dan keluarganya berhasil menghindar dari nasib buruk karena sempat menyelamatkan diri ke Medan.

Pasca tragedi Revolusi Sosial, belum jelas bagaimana sikap pemerintah Republik Indonesia terhadap apa yang terjadi pada tatanan politik yang sudah ada sejak ratusan tahun di Sumatera Timur itu. Pemimpin Republik yang baru terbentuk ini tentu punya konsep untuk menarik pemerintahan yang sudah ada di Nusantara agar rela bergabung dengan Republik.

Dalam uraian ini penulis tidak bermaksud untuk menelaah pandangan pemerintah baru terhadap kekuasaan pemerintah lama di daerah masing-masing. Tulisan ini lebih fokus pada bagaimana dinamika dan sikap politik Kerajaan Padang sebelum pemerintahan Tengku Hasyim serta bagaimana sikap politik Tengku Hasyim atas Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian bagaimana eksistensi Tengku Hasyim pasca kemerdekaan di Tebing Tinggi. Untuk membedah masalah ini digunakan *field research* dengan menerapkan heuristik untuk mendapatkan sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, *library research* untuk mendapatkan informasi tertulis seperti buku-buku, maupun dokumen-dokumen yang relevan dan perlu terhadap kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerajaan Padang Pra Kemerdekaan

Dinamika politik di Kerajaan Padang tidak lepas dari kondisi internal dan eksternal yang berkembang pada masa awal kemerdekaan yang diiringi gejolak masyarakat akibat adanya perubahan struktur sosial. Suasana yang penuh dengan kegembiraan lepas dari penjajahan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bergerak lebih lepas dan bebas. Suasana euforia kemerdekaan begitu mewarnai kejiwaan masyarakat sehingga menyentuh pada tataran lama yang sudah ada secara politis yakni sistem kerajaan. Menurut Khalik dinamika politik dan kekuasaan di Kerajaan Padang dipengaruhi oleh oleh faktor internal dan faktor eksternal (Khalik, 2014, pp. 108-128). Secara eksternal dinamika politik Kerajaan Padang acap kali menjadi sasaran penaklukan, penjajahan dan aneksasi oleh kekuatan luar baik dari bangsa sendiri maupun bangsa penjajah atau gabungan dari keduanya.

Secara internal dinamika politik dan kekuasaan di Kerajaan Padang, relatif tenang dikarenakan suksesi berjalan dengan tertib. Suksesi Kerajaan Padang berlangsung secara alamiah dengan azas genealogis dari sejak awal kerajaan ini ditubuhkan masa Baginda Umar Saleh Qamar (1630-1659) hingga Marah Titim gelar Tengku Tebing Pangeran (1807-1823). Faktor eksternal dalam dinamika politik kerajaan Padang ketika Marah Hakum gelar Raja Graha wafat (1870) posisinya digantikan oleh

anak tertua bernama Marah Hudin (1870-1914). Pada masa Marah Hudin Kerajaan Padang berada di bawah taklukan Kesultanan Deli sehingga menimbulkan gejolak politik dalam wujud penolakan, meski pertentangan ada namun bisa diselesaikan berkat bantuan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Ketika perusahaan-perusahaan perkebunan hendak memperluas areal tanam mereka hingga ke negeri Padang sekitar tahun 1870, Tengku Haji Muhammad Nurdin menolak keras. Kala itu, Sultan Deli Mahmud Al-Rasyid Perkasa Alamshah (1858-1873) telah memberikan persetujuan perluasan perkebunan di negeri Padang secara sepihak. Karena menolak dan tidak mau tunduk atas keputusan Sultan Deli, Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamshah (1873- 1924), penerus Sultan Mahmud memutuskan untuk mencabut status Tengku Muhammad Nurdin dari raja (wazir) Kerajaan Padang pada tahun 1885 dan menunjuk penggantinya, Raja Muda Tengku Sulaiman pada tahun 1885 dan menjabat sampai tahun 1888).

Namun sikap keras Kesultanan Deli terhadap Tengku Haji Muhammad Nurdin menimbulkan kebencian di antara rakyat Padang. Terjadilah perlawanan terhadap Kesultanan Deli di berbagai kampung selama bertahun-tahun. Perkebunan-perkebunan asing kerap mengalami kerugian akbiat gangguan dari rakyat yang loyal dengan Tengku Haji Muhammad Nurdin. Bahkan raja Kerajaan Pematang Raya Tuanku Rondahaim yang berkedudukan di Buntu Pane mendukung sikap penolakan Kerajaan Padang terhadap Kesultanan Deli yang didukung oleh Belanda dengan cara membuka front perlawanan.

Dalam pertempuran di kebun Bandar Bejambu pada 9 Oktober 1887 Syah Bokar berhasil ditembak pasukan Kapten Schenk, sehingga gugur sebagai kesuma bangsa bersama 22 pasukannya. Sedangkan pasukan Belanda hanya 2 orang yang gugur. Jasad Raja Syah Bokar dimakamkan di kebun Bandar Bejambu (sekarang masuk dalam kawasan Afdeling I Bandar Bejambu). Setelah Syah Bokar gugur, perlawanan terhadap pasukan Belanda menurun, bahkan berhasil mengusir pasukan Rondahaim dari wilayah Padang kembali ke Raya. Sejak itu, Belanda mulai membangun perkebunan di Negeri Padang.

Pertikaiaan dengan Belanda berlanjut dalam Perang Padang II dengan Dolok Merawan (1888-1885). Pemerintah kolonial Belanda tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi perang ini karena dalam waktu yang bersamaan juga menghadapi perlawan dari rakyat di Sumatera dan Jawa. Perlawanan di daerah ini ini dipimpin oleh Rondahaem. Untuk menghindari pertikaian dari dalam pemerintahan Padang, maka pemerintah Kolonial mendudukkan kembali Haji Muhammad Nurdin sebagai Raja Kerajaan Padang dengan sejumlah syarat mengikat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi Tengku Haji Muhammad Nurdin, adalah melepas sejumlah kampung dari kekuasaan Kerajaan Padang dan kemudian diserahkan kepada pengawasan Belanda. Kampung-kampung itu persis berada di tepian sungai Padang dan Bahilang, yakni Tebing Tinggi, Badak Bejuang, Rambung dan Pasar Baru. Belanda kemudian menempatkan seorang *Controleur* untuk wilayah Padang Bedagai pada 1887 yang berkedudukan di Kampung Tebing Tinggi.

Pada tahun 1888 status Tengku Haji Muhammad Nurdin dipulihkan kembali sebagai raja (wazir) Negeri Padang. Namun, tidak lagi memiliki wewenang luas sebagai penguasa atas negerinya. Pada masa akhir pemerintahannya, Negeri Padang memiliki dua pemerintahan, yakni wilayah Kerajaan dan wilayah kontrol Belanda (otonom). Tengku Haji Muhammad Nurdin memindahkan pusat kekuasaan dari Kuta Raja ke Kampung Bandar Sakti. Kuta Raja sekarang dikenal dengan Kuta Usang (tua). Adapun wilayah kontrol Belanda berpusat di Kampung Tebing Tinggi Lama. Kedua wilayah ini dipisahkan oleh aliran sungai Bahilang yang kala itu muaranya menjadi pusat perdagangan yang dihuni etnik Tionghoa, sekarang dikenal *China Town* yang terletak di Jalan Bedagai dan Jalan Patriot Kecamatan Tebing Tinggi Kota.

Wilayah kontrol Belanda terdiri atas empat kampung, namun pengaruhnya sangat kuat karena punya wewenang besar atas areal perkebunan yang luas. Bahkan, perkebunan yang dibangun Belanda serta berbagai perusahaan asing lainnya melebihi luasnya wilayah kerajaan. Di wilayah Padang selain areal perkebunan milik pengusaha Belanda, terdapat juga perkebunan milik pengusaha Inggris dan Belgia. Inggris yang membuka perkebunan di daerah Sei Berong, Mendaris, Bahilang, Sibulan dan Paya Pinang serta Tanah Besi. Demikian pula di kawasan Dolok Masihul, Bah Bulian hingga Silau Dunia.

Anak tertua Tengku Haji Muhammad Nurdin yakni Tengku Alamsyah dari istri ketiga bernama Tengku Hj. Syarifah Zawiyah berasal dari Kesultanan Kedah Malaysia. Ia menempuh pendidikan di Batavia setelah menyelesaikan pendidikannya memimpin Kerajaan Padang (1928-1931). Tengku Alamsyah dilantik sebagai wazir Kerajaan Padang oleh Sultan Amaluddin Al-Sani Perkasa Alamsyah (1924-1945).

Pada masa raja ke-10 Kerajaan Padang inilah dibangun lapangan sepak bola yang megah. Pertama kali lapangan sepak bola tersebut dibangun di Kampung Bandar Sakti (sekarang diidentifikasi sekitar areal pabrik mie di Lingkungan 03, Kelurahan Bandar Utama). Kemudian pada 1930, lapangan itu dipindahkan ke lahan milik perusahaan perkebunan Horrison & Crosfield di Kampung Jati. Lapangan sepak bola itu belakangan dikenal sebagai lapangan sepak bola Kampung Durian, terletak di Jalan A. Yani dan jalan dr. H. Kumpulan serta jalan Prof. Hamka. Lapangan itu menjadi markas klub sepak bola bernama 'Padang Sport Club' yang didirikan oleh Tengku Alamsyah.

Kegiatan pembangunan ini menyeret Tengku Alamsyah ke pengasingan karena dinilai menghamburkan kas kerajaan. Belakangan diketahui bahwa tidak ada dana yang diambil Tengku Alamsyah dari kas kerajaan untuk kegiatan yang jadi hobinya itu. Namun, laporan lain, dana yang dipakai itu kemudian dikembalikan ke kas kerajaan. Pemerintahan Kesultanan Deli kemudian merehabilitasi nama baik Tengku Alamsyah, namun posisinya sebagai raja ke-10 Kerajaan Padang tidak dipulihkan. Alasannya, saat pemulihan nama itu, Kerajaan Padang dipimpin saudara satu ayah yang memerintah di Bandar Khalifah, yakni Tengku Ismail menjadi pemangku kerajaan. Tengku Ismail menjadi pemangku Kerajaan Padang selama dua tahun (1931-1933) menunggu pewaris lainnya yakni Tengku Hasyim kembali dari menempuh pendidikan.

Tengku Hasyim di Arus Politik

Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 bergema hingga ke Tebing Tinggi dan sekitarnya yang membakar semangat rakyat untuk merdeka. Kepastian kemerdekaan itu menjamin keselamatan rakyat dari tindakan sewenang-wenang penjajah. Terkait momen ini, Tengku Hasyim sebagai pemegang mandat dalam struktur politik lokal, pada bulan September 1945 didatangi oleh pimpinan Barisan Pemuda Indonesia (BPI) yang terdiri dari Bachtiar Hakim, Chuddam Lubis dan Amir Hamzah. Mereka mengadakan pertemuan di Balai Kerapatan Kerajaan Padang (sekarang kantor Koramil 13 Jalan Kapt. F Tandean) dan menanyakan pandangan Tengku Hasyim atas pengumuman kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pertemuan ini Tengku Hasyim menyambut kemerdekaan dan menyetujui proklamasi itu. BPI mengajak Kerajaan Padang untuk bergabung dengan RI.

Dalam dialog itu Tengku Hasyim mengatakan:

> "Ajakan tuan-tuan saya sambut dengan baik dan saya sendiri *an sich* solider dan sangat setuju sekali. Saya tidak menolak dan tidak menghalangi langkah perjuangan tuan-tuan dan pemuda Indonesia. Saya tidak usah aktif dulu, biarlah kalian."

Utusan pemuda yang datang kemudian mengatakan:

> "Kalau Tengku tidak aktif dan tidak menghalangi, kami minta sekurang-kurangnya Tengku akan membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia kita ini dan kami minta di halaman rumah (istana) dan kantor (kerapatan) Raja, dikibarkan bendera merah putih."

Jawab Tengku Hasyim kemudian:

> "Saya setuju, bendera merah putih akan dititahkan untuk dikibarkan, dan penghulu-penghulu kampung yang berada di wilayah Kerajaan Padang, boleh turut aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan tak ada larangan." (Khalik, 2014).

Berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus dibawa oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan sebagai Gubernur Sumatra dan Mr. Amir selaku Wakil Gubernur Sumatra, mengumumkan berita kemerdekaan itu di Lapangan Fukuraido (sekarang Lapangan Merdeka) Medan pada tanggal 6 Oktober 1945. Kekalahan Belanda dalam perang fisik dan diplomasi tidak serta merta menjadikan mereka angkatan kaki dari Nusantara. Kedatangan pasukan AFNEI dimanfaatkan Belanda untuk berboncengan dan mempersiapkan kekuatan untuk mengambil alih pemerintahan dan membebaskan tawanan perang orang-orang Belanda di Medan.

Uraian selanjutnya dipaparkan Khalik bahwa ketika Proklamasi Kemerdekaan telah dikumandangkan di Lapangan Merdeka Tebing Tinggi pada bulan Oktober 1945, Kerajaan Padang diwakili Tengku Hasyim. Beliau dikenal sebagai Raja yang memihak dan mendukung Republikan (pejuang kemerdekaan). Sebagai tanda dukungannya terhadap perjuangan kemerdekaan adalah merelakan istana Kerajaan Padang di Kampung Bandar Sakti dijadikan sebagai markas dan tempat persembunyian. Pada peristiwa berdarah 13 Desember 1945 di Tebing Tinggi, bala tentara Jepang yang kalah pada Perang Dunia II yang bermarkas di berbagai perkebunan di Kerajaan Padang menyerang Tebing Tinggi, Tengku Hasyim dan kerabat Kerajaan Padang menyelamatkan puluhan pemuda dengan cara menyembunyikan mereka dari pasukan Jepang (Khalik, 2014, p. 134-135).

Istana kerajaan di Bandar Sakti menjadi tempat persembunyian para pejuang yang diburu tentara Jepang yang sudah panik. Dapur Istana menjadi sumber pengadaan pangan bagi para pejuang yang tidak bisa masuk ke Tebing Tinggi, karena beberapa hari telah dikurung pasukan Jepang. Istana raja sendiri aman dari gangguan tentara Jepang, sehingga menjadi kawasan yang aman untuk menyelamatkan diri. Demikian pula dengan kediaman sejumlah petinggi kerajaan, baik yang ada di Bandar Sakti, Kuta Usang dan Bulian menjadi tempat yang aman bagi para pemuda pejuang. Bahkan masjid resmi kerajaan menjadi pusat kegiatan pejuang, khususnya Laskar Hizbullah dipimpin Syekh Beringin. Sikap terbuka terhadap semua kalangan, ditujukan sebagai upaya untuk menjaga keselamatan raja, keluarga raja, takhta kerajaan. Salah satu sikap terbuka adalah kesediaan keluarga kerajaan untuk masuk dalam berbagai organisasi pejuang dan politik yang dinilai progresif. Ada keluarga Kerajaan yang masuk KNIL, PNI, NU, Masyumi bahkan masuk PKI.

Aktivitas politik Tengku Hasyim pasca Revolusi Indonesia tidak dapat dinafikan dari adanya upaya untuk mengubah struktur sosial dan politik secara menyeluruh. Tatanan politik tradisional menjadi salah satu sasaran, dengan melenyapkan kekuasaan tradisional yang pernah ada. Ide untuk menghapus kekuasaan lokal sejatinya belum dikaji secara komprehensif, alih-alih ada upaya meruntuhkan tatanan politik ini dengan cara menghapusnya. Tindakan ini jika dikaji secara murni tanpa ada pengaruh pemikiran yang membenci penguasa lokal sejatinya adalah tindakan yang ahistoris karena tidak menilai sama sekali keberadaan tatanan politik pada masa lalu. Padahal setelah kemerdekaan beberapa pemerintahan lokal menunjukkan sikap yang kooperatif terhadap Republik dengan harapan status mereka menjadi jelas dalam tatanan politik yang baru nanti, serta kedudukan mereka akan ditentukan dalam struktur baru yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Akan tetapi sikap

para bangsawan yang relatif tarik-ulur tentang penyerahan kekuasaan pada pemerintah pusat menimbulkan tafsiran yang tajam di kalangan Republikan sehingga menimbulkan gejolak yang luar biasa kerasnya bahkan menimbulkan keguncangan yang dikenal dengan Revolusi Sosial dan serta merta meruntuhkan tatanan sosial masyarakat Melayu sebagai pemilik wilayah (Reid, 1987, p. 47).

Revolusi ini merupakan hantaman yang sangat keras bagi masyarakat Melayu yang telah membangun peradaban berbilang abad dan menjadikan mereka salah satu kelompok sosial yang membentuk peradaban di kawasan ini (Sumatera Timur) menjadi terpinggirkan di kampung sendiri. Hal berdampak hilangnya wibawa dan martabat raja-raja dan para sultan yang jumlahnya untuk Sumatera Timur saja dua puluh lima kerajaan-kesultanan habis tandas tergulung dalam arus besar perubahan politik (Agustono, 2018). Duka masyarakat Melayu sejatinya tidak lepas dari sikap pemerintah pusat yang tidak jelas pandangannya melihat dinamika politik di Sumatera Timur. Suasana yang tidak memberi kejelasan posisi penguasa lokal, membuat kerajaan berada dalam posisi yang galau dan dicermati cenderung mempertahankan *status quo*. Dengan kata lain, Agustono menyebutnya bahwa penguasa lokal tradisional (raja-sultan) beserta kebesarannya ada yang canggung beradaptasi dengan republik, sehingga dalam gemuruh perubahan politik dimakan sendiri oleh rakyatnya yang berujung dengan menghilangnya dan hancurnya kerajaan/kesultanan.

Dalam peristiwa ini sejatinya kelompok masyarakat yang "melahap pemerintahan kerajaan" bukanlah dari oknum masyarakat Melayu. Di Asahan misalnya, kelompok ekstremis adalah warga yang berasal dari luar kerajaan. Demikian pula di Langkat, kelompok ekstremis adalah warga yang berada dalam naungan organisasi Pesindo, Napindo, PKI. Di Simalungun, kelompok ekstremis adalah warga yang tergabung dalam laskar-laskar revolusioner. Revolusi Sosial di Simalungun tidak sepenuhnya dilakukan oleh golongan proletar (buruh dan petani). Sementara itu, rakyat asli Simalungun masih setia kepada rajanya (Harahap, 2019, p. 86). Demikian juga di Bilah, sikap rakyat tidak berubah dan tetap loyal kepada raja (Sinar, 2006, p. 256). Pemerintah kerajaan tidak kuat melawan tindakan para ekstremis ini karena mereka langsung menyerbu ke pusat pemerintahan/istana yang juga tempat bersemayam kerabat kesultanan secara brutal. Para ekstremis membantai para kerabat seperti yang terjadi di Kualuh, Asahan, dan Langkat. Walaupun demikian, Reid menilai bahwa kerajaan tetap mempertahankan pemerintahannya yang samar-samar, tetapi ini pun berangsur-angsur semakin tersisih dari hakikat kekuasaannya. Peristiwa ini melanda seluruh kekuasaan raja yang ada di Sumatera Timur (Reid, 1987, p. 356).

Semangat revolusi nasional Indonesia yang bertujuan untuk menghapuskan sistem penjajahan dan menyatukan seluruh bangsa Indonesia, akhirnya mencatat suatu pemandangan yang mengerikan dalam bentuk penghancuran terbesar yang menjadi ingatan kolektif masyarakat Melayu sebagai korban revolusi dengan dalih perjuangan kemerdekaan. Jadi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masyarakat Melayu yang juga ikut berjuang untuk kemerdekaan ini menjadi komunitas yang paling teruk dari sudut sosial dan budaya sehingga menanggung beban yang menistakan sebagai *kontra republikan*; revolusi sosial adalah penghancuran peradaban khususnya Melayu di Sumatera Timur sehingga menjadi luka dan duka yang dalam.

Semangat Revolusi Nasional membentuk tatanan baru lepas dari penjajah Belanda mengusung nilai yang tinggi dari sudut kemanusiaan dan hak-hak asasi sebagai makhluk Tuhan yang beradab. Tuntutan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang sederajat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, telah menabrak nilai dasar perjuangan itu sendiri. Tidak dapat dinafikan bahwa semangat menegakkan kesederajatan telah mendorong terjadinya Revolusi Sosial di Sumatera Timur yang mempunyai tatanan sosial terstruktur. Asumsi bahwa kekuasaan di Sumatera Timur merupakan kaki tangan pemerintahan kolonial Belanda yang dijadikan Belanda untuk mengendalikan rakyat Sumatera Timur. Oleh karena itu, bila raja- raja tersebut tidak mau menerima bentuk pemerintahan Republik Indonesia yang demokratis maka mereka harus diturunkan dari takhtanya. Namun, proses penurunan itu mencederai semangat Revolusi Nasional itu sendiri yang muncul adalah tindakan

kekerasan, aniaya, perampokan, pembunuhan dan pemerkosaan sebagaimana yang terjadi di Langkat, Asahan, Panai, dan Kualuh.

Ketika Revolusi Sosial menerpa kerajaan Padang, Tengku Hasyim dan keluarga pada tanggal 3 Maret 1946 sempat ditangkap dan ditahan oleh pasukan *Volksfront* Tebing Tinggi. Bahkan, Tengku Hasyim dan beberapa keluarganya, di antaranya istri dan anak laki-lakinya sudah diberi pita merah yang berarti akan dibunuh oleh sukarelawan yang menangkap mereka di istana Bandar Sakti. Namun, saat dalam penahanan salah seorang zuriat Kerajaan Padang dari Tanjung Kasau yang bergabung dengan *Volksfront* berjasa menyelamatkan nyawa Tengku Hasyim dan keluarganya dengan cara melarikan ke hutan di sekitar aliran sungai Padang. Esok harinya tanggal 4 Maret 1946, kemanakan Tengku Hasyim, yakni Tengku Izhanolsyah anak dari Tengku Alamsyah yang menjadi polisi sekutu mencari Tengku Hasyim dan keluarga. Setelah bertemu, mereka dibawa dengan truk militer Sekutu menuju istana Maimoon di Medan untuk penyelamatan diri.

Sejak itu dilakukan peralihan mandat Negeri Padang kepada pemerintah pusat yang diwakili oleh Walikota Munar S. Hamijoyo melalui serah terima "inventaris dan pegawai Kerajaan Negeri Padang Tebing Tinggi" dari *Het Hoofd Bestuur van Padang* terakhir Tengku Hasyim. Sejak itu, Kerajaan Padang dihapus dari perpetaan politik pemerintah kerajaan di Sumatera Timur dan seutuhnya menjadi bagian Republik sejak April 1946. Tengku Hasyim mengakhiri kekuasaan Kerajaan Padang dengan *husnul khatimah* dan menyerahkan Negeri Padang ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan ikhlas.

Penyerahan Negeri Padang ke pangkuan ibu pertiwi oleh Tengku Hasyim bukan berarti Ia melepaskan tanggung jawabnya sebagai pemimpin masyarakat negeri Padang. Ia punya tanggung jawab moral untuk mendampingi masyarakatnya dalam tatanan sosial politik yang baru. Seperti dimaklumi pada masa Agresi Militer I pada 1 Juli 1947, wilayah Tebing Tinggi terdapat dua pemerintahan, selain pemerintahan Republik Indonesia di bawah Munar S. Hamidjojo, karena Tebing Tinggi termasuk dalam kekuasaan militer Belanda. Militer Belanda membentuk pemerintahan sipil yang disebut '*Regeeringcommissarissen voor Bestuursaangelegenhaden*' atau disingkat Recomba. Recomba menguasai kawasan pesisir Deli dan Serdang, di mana pemerintahan sipilnya atau '*Het Hoofd van Tijdelijk Bestuur'* HTB dipimpin oleh Mr. J. Geeritsen, Ia pernah menjadi Kontrelir Serdang Hulu di bawah Residensi Sumatera Timur. Sedangkan para pembantunya disebut dengan '*Hoofd van Plaatselijk Bestuur*' (HPB).

Untuk wilayah Padang Bedagai diangkat sebagai HPB di bawah W. J. van Boomel. Boomel, kemudian mengangkat pembantunya di wilayah masing-masing dengan sebutan '*Ambtenaar Bestuur Aangelegenhedeen*' (ABA) untuk Kotapraja Tebing Tinggi adalah Tengku Hasyim. Sedangkan *District Hoofd* untuk Tebing Tinggi adalah Datuk Zakaria. Tengku Hasyim ketika menjabat *Ambtenaar Bestuur Aangelegenhedeen* di Tebing Tinggi menekankan kepada masyarakatnya tentang pandangan sama rata. Pada dasarnya, Ia bekerja sama dengan pemerintahan Belanda dengan cara menyewakan tanah kepada pihak Belanda untuk dijadikan perkebunan, dan sebagai tempat membangun fasilitas masyarakat Tebing Tinggi seperti rumah sakit, *waterleiding*, bioskop, dan pasar. Ini adalah fasilitas umum untuk masyarakat Tebing Tinggi agar mudah dalam menempuh kehidupan. Jasanya tentu terlahir dari kecintaan dan tanggung jawab untuk mengayomi masyarakat kota. Tengku Hasyim menjabat sebagai *Ambtenaar Bestuur Aangelegenhedeen* di Tebing Tinggi selama 3 tahun saja.

Pada masa kepemimpinan Tengku Hasyim terdapat beberapa peristiwa penting yaitu Proklamasi Kemerdekaan, Revolusi Sosial dan Agresi Militer Belanda I. Ketika peristiwa Agresi Militer Belanda I, Ia menjabat sebagai kepala wilayah. Bila kita kaji lebih lanjut bahwa Ia mampu menjalankan roda pemerintahan pada saat itu. Perjuangannya dalam mengisi kemerdekaan tidaklah berlangsung lama, namun dengan pemikirannya beliau melakukan kerjasama dengan Belanda untuk membangun fasilitas bagi masyarakat kota Tebing Tinggi adalah buah karya yang tidak bisa dinafikan. Cita-citanya

yang luhur untuk menyenangkan masyarakatnya merupakan wujud bakti sebagai pemimpin sosial dan politik yang berakar dari sejarah panjang kerabatnya yang menekankan kepada masyarakatnya tidak boleh terjadi kesenjangan sosial.

SIMPULAN

Sikap politik Tengku Hasyim saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tidak perlu diragukan, Ia jelas mendukung kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyerahkan kekuasaannya kepada Republikan. Namun sikap positif yang ditunjukkannya telah dinodai oleh sentimen negatif yang berkembang di antara rakyat kepada kalangan bangsawan Melayu. Pada peristiwa Revolusi Sosial, tatanan sosial politik Melayu termasuk Kerajaan Padang runtuh. Ketika peristiwa itu terjadi Tengku Hasyim berhasil selamat dari peristiwa berdarah tersebut. Kerajaan Negeri Padang pasca peristiwa itu dinyatakan bubar dan bergabung dengan Republik Indonesia.

REFERENSI

Agustono, B. *Analisa*, 25 Januari 2018.

Anhar, M. Azhari. (2010). *Kerajaan Padang dalam Upaya Pelestarian Sejarah Lokal (1612- 1946)*. Skripsi: Universitas Negeri Medan.

Harahap, H. (2019). *Laskar Revolusioner Sumatera Timur.* Yogyakarta: Deepublish.

Khalik, A. (2014). *Negeri Padang Tebing Tinggi dari Masa ke Masa: Kerajaan Padang dan Kota Tebing Tinggi sejak Berdirinya hingga Kini.* Medan: Wal Asri Publishing.

Khalik, A. (2015). *Tebing Tinggi One dan Pengabdiannya.* Medan: Asri Publishing.

Qasim, A. (1993). *Kekerasan dalam Sejarah: Masyarakat dan Pemerintahan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia:

Reid, A. (1987). *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Reid, A. (2011). *Menuju Sejarah Sumatera: Antara Indonesia dan Dunia.* Jakarta Yayasan Obor Indonesia dan KITLV.

Reid, A. (2012). *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sinar, T. L. (2006). *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur*. Medan: Yayasan Kesultanan Serdang.